

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerimaan Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Putu Ria Septiani<sup>1</sup>, Rindu Rika Gamayuni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Lampung

Email ; [puturiass79@gmail.com](mailto:puturiass79@gmail.com)<sup>1</sup>, [rindu.gamayuni@yahoo.com](mailto:rindu.gamayuni@yahoo.com)<sup>2</sup>

**Abstract** This study aims to prove empirically the effect of financial performance on the receipt of Regional Incentive Funds in provincial governments in Indonesia. Measurement of financial performance uses the Regional Financial Independence Ratio and the Regional Expenditure Efficiency Ratio. The research method used is quantitative method with sample selection using purposive sampling technique in order to obtain 30 provincial governments as research samples within 3 years. The data analysis method used is multiple linear analysis using IBM SPSS Statistics 26. The results of this panel research are that simultaneously the Independence Ratio and the Efficiency Ratio have a positive effect on Regional Incentive Funds. Partially, the Regional Financial Independence Ratio which compares Regional Original Income to total regional income has a positive and significant effect on Regional Incentive Funds. The Regional Expenditure Effectiveness Ratio which compares the realization of regional expenditures to the regional expenditure budget partially has a positive and significant effect on Regional Incentive Funds.

**Keyword:** Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Regional Shopping Effectiveness Ratio and Regional Incentive Funds.

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap penerimaan Dana Insentif Daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 30 pemerintah provinsi sebagai sampel penelitian dalam kurun waktu 3 tahun. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 26. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan Rasio Kemandirian dan Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah. Secara parsial, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Insentif Daerah. Begitu pula, Rasio Efektifitas Belanja Daerah yang membandingkan realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Insentif Daerah.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Belanja Daerah dan Dana Insentif Daerah

### Pendahuluan

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada evaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Evaluasi ini penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran dan sumber daya finansialnya dalam rangka memberikan layanan publik yang efektif kepada masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu: Penerimaan Pendapatan yang meliputi berbagai sumber pendapatan pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dana alokasi dari pemerintah pusat (seperti DAU dan DAK), dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Peningkatan penerimaan pendapatan bisa mencerminkan kemampuan daerah untuk mengelola dan memperoleh sumber daya finansial.

Selanjutnya, terdapat pengeluaran dan Investasi yang mencakup anggaran untuk berbagai program dan proyek, termasuk pengeluaran operasional dan investasi dalam infrastruktur. Evaluasi efisiensi dan efektivitas pengeluaran menjadi penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Hal penting lainnya yaitu surplus anggaran terjadi ketika penerimaan melebihi pengeluaran, sementara defisit terjadi ketika pengeluaran melebihi penerimaan. Surplus anggaran dapat menunjukkan kesehatan keuangan pemerintah daerah, sementara defisit anggaran mungkin menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

Dalam laporan keuangan, posisi keuangan menjadi evaluasi keseluruhan kesehatan keuangan pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas bersih. Posisi keuangan yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak dan menghadapi risiko finansial. Penting untuk diingat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran populasi, struktur ekonomi, tingkat pendapatan, dan tingkat perkembangan wilayah tersebut. Informasi terbaru dan data resmi dari lembaga pemerintah setempat dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri, pemerintah pusat telah menyediakan insentif atau penghartrgaan bagi daerah yang memiliki kinerja yang baik serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi berlangsungnya ekonomi pembangunan yang berkelanjutan berupa Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah dapat menjadi motivasi bagi daerah untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki, yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah direncanakan.

DID telah diterapkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2010 yang mana pada saat itu dana tersebut difokuskan untuk kegiatan Pendidikan. Sejak saat itu, pemerintah daerah terus berusaha untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki. Berikut ini perkembangan penerima DID oleh pemerintah provinsi selama tahun 2019-2021, yaitu:

**Tabel 1 Perkembangan Provinsi Penerima DID tahun 2019-2021**

Nama Provinsi	2019	2020	2021
Aceh		✓	✓
Sumatera Utara			
Sumatera Barat	✓	✓	✓
Riau	✓	✓	✓
Jambi	✓	✓	✓
Sumatera Selatan	✓	✓	

Bengkulu	✓	✓	✓
Lampung	✓	✓	✓
DKI Jakarta	✓	✓	✓
Jawa Barat	✓	✓	✓
Jawa Tengah	✓	✓	✓
DI Yogyakarta	✓	✓	✓
Jawa Timur	✓	✓	✓
Kalimantan Barat	✓		✓
Kalimantan Tengah	✓	✓	✓
Kalimantan Selatan	✓	✓	✓
Kalimantan Timur	✓	✓	✓
Kalimantan Utara		✓	✓
Sulawesi Utara	✓	✓	✓
Sulawesi Tengah	✓	✓	✓
Sulawesi Selatan	✓	✓	✓
Sulawesi Tenggara	✓	✓	✓
Sulawesi Barat	✓	✓	✓
Bali	✓	✓	✓
NTB	✓	✓	✓
NTT		✓	✓
Maluku			✓
Maluku Utara		✓	
Banten		✓	✓
Bangka Belitung	✓	✓	✓
Kepulauan Riau	✓	✓	✓
Papua Barat		✓	
Gorontalo	✓	✓	✓
Papua			✓
Total	25	29	30

*Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan RI, diolah.*

Pemberian DID di Indonesia diatur dalam PMK No.167/PMK.07/2020 tentang perubahan Atas PMK No.141/PMK.07/219 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, yang mana salah satu kategori penerima DID adalah Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kriteria kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menghitung tingkat kemandirian suatu daerah dan efisiensi belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program-program daerah.

## **Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan dan Dana Insentif Daerah**

Rasio kemandirian keuangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas atau organisasi, seperti pemerintah daerah, mampu menghasilkan pendapatan sendiri untuk mendukung kegiatan operasional dan pengeluarannya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana entitas tersebut bergantung pada sumber pendapatan internalnya dibandingkan dengan sumber pendapatan eksternal seperti dana alokasi dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan suatu entitas terhadap sumber pendanaan eksternal.

Pendapatan Asli dapat mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi, hasil usaha, dan sumber pendapatan internal lainnya. Total Pendapatan mencakup semua sumber pendapatan, termasuk pendapatan asli serta dana alokasi dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan eksternal lainnya. Rasio kemandirian keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam analisis keuangan untuk mengevaluasi stabilitas dan keberlanjutan keuangan suatu entitas, termasuk pemerintah daerah.

Dengan tingkat kemandirian yang baik, menggambarkan pemerintah daerah mampu menghasilkan PAD dengan maksimal untuk membiayai berbagai kegiatannya dan tidak bergantung pada dana transfer. Hal tersebut tentu memenuhi kriteria kinerja keuangan dalam kategori Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga daerah tersebut patut diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dana insentif daerah.

*H1: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah*

## **Hubungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan Dana Insentif Daerah**

Rasio efisiensi belanja daerah dapat berhubungan dengan dana insentif daerah dalam konteks cara pemerintah daerah mengelola anggaran dan pengeluarannya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari dana yang tersedia. Rasio efisiensi belanja daerah mengukur seberapa baik pemerintah daerah dapat mengalokasikan dan meng Jika pemerintah daerah memiliki efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pengeluaran, ini bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menanggung biaya sendiri untuk proyek-proyek atau program-program tertentu. Hal ini bisa membuat mereka lebih kompetitif dalam mendapatkan dana insentif, karena mereka dianggap mampu mengelola dana tersebut dengan baik. elola dana yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan public.

Efisiensi dalam belanja daerah dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang

mereka miliki, mereka mungkin tidak hanya mengandalkan dana insentif, tetapi juga dapat mengandalkan pendapatan asli dan sumber daya lainnya. Efisiensi dalam penggunaan dana insentif juga dapat membantu mewujudkan keberlanjutan program yang didanai oleh dana tersebut. Penggunaan dana dengan efisien dapat membantu memaksimalkan manfaat jangka panjang dari proyek atau program yang didukung oleh insentif. Dengan kata lain, hubungan antara rasio efisiensi belanja daerah dan dana insentif daerah adalah bahwa efisiensi dalam penggunaan dana insentif dapat meningkatkan nilai dan dampak dari dana tersebut, sambil juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara bijaksana.

*H2: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan informasi atau data yang telah ada sebelumnya yaitu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Provinsi di Indonesia periode 2019-2021.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia. Provinsi dan Kabupaten/kota yang ada di Indonesia per tahun 2021 berjumlah 34 provinsi. Dari populasi yang ada, selanjutnya dilakukan *purposive sampling* untuk menenukan sampel penelitian dengan kriteria pemerintah provinsi yang mendapatkan DID tahun 2021, yaitu sebanyak 30 provinsi.

### **Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian**

Variable independent atau bebas pertama dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ ), yang dihitung menggunakan rumus:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sedangkan, variable independent kedua dalam penelitian ini adalah Rasio Efisiensi Belanja Daerah yang dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu, statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji korelasi dan uji multikolinearitas, yang kemudian dilakukan analisis linier berganda dengan model regresi, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: Dana Insentif Daerah,  $\alpha$ : Konstanta,  $\beta$ : Koefisien Regresi,  $X_1$ : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,  $X_2$ : Rasio Efektifitas Belanja Daerah,  $\varepsilon$ : *Error Term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Insentif Daerah dihitung berdasarkan kinerja tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya. Berikut ini RKKD ( $X_1$ ) dan REBD ( $X_2$ ) yang dihasilkan selama tahun 2019-2021, yaitu:

Tabel 2. Rasio RKKD dan REBD Pemerintah Provinsi di Indonesia

Provinsi	X1	X2	DID (Y)
Aceh	18%	83%	Rp 6,728,200,000.00
Sumatera Barat	36%	94%	Rp 50,715,542,000.00
Jambi	37%	92%	Rp 18,433,747,000.00
Riau	41%	91%	Rp 32,468,699,000.00
Bengkulu	28%	93%	Rp 18,831,248,000.00
Lampung	42%	94%	Rp 17,389,748,000.00
Bangka Belitung	31%	90%	Rp 56,438,997,000.00
Kep. Riau	35%	96%	Rp 44,437,322,000.00
DKI Jakarta	68%	86%	Rp 43,370,860,000.00
Jawa Barat	56%	89%	Rp 88,165,762,000.00
Jawa Tengah	55%	95%	Rp 68,710,605,000.00
Jatim	57%	92%	Rp 52,437,560,000.00
Banten	60%	90%	Rp 44,965,885,000.00
Bali	56%	87%	Rp 37,584,263,000.00
NTB	35%	91%	Rp 68,522,247,000.00
NTT	23%	87%	Rp 7,439,612,000.00
Kalimantan Barat	39%	92%	Rp 16,638,945,000.00
Kalimantan Tengah	35%	93%	Rp 18,725,767,000.00



(Constant)	102840987.0	7889402892		-1.304	0.203		
	08	2.718					
RKKD	67697912.55	2815640511	0.430	2.404	0.023	0.747	1.339
	3	7.476					
REBD	129744578.8	9334776560	0.249	1.390	0.036	0.747	1.339
	86	3.997					

a. Dependent Variable: DID

Model persamaan regresi dalam penelitian ini diuji menggunakan stingkat signifikansi 5%, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$DID = 102.840.987,008 + 67.697.912,553 X_1 + 129.744.578,886 X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil model regresi linier berganda dapat menggambarkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 102.840.987.008,600, artinya apabila RKKD (X1) dan REBD (X2) adalah nol, maka Dana Insentif Daerah tetap Rp.102.840.987,008.
2. Nilai koefisien regresi untuk variable RKKD (X1) bernilai 2,404, yang menunjukkan apabila tingkat kemandirian meningkat satu satuan, maka DID akan bertambah sebesar Rp.67.697.912,553 dengan asumsi variable lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variable REBD (X2) bernilai 0.036 menunjukkan apabila tingkat efisiensi belanja meningkat satu satuan, maka DID akan bertambah sebesar Rp. 129.744.578,886, dengan catatan variable lain adalah tetap.

H1 dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jika dilihat dari table 3, menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variable X1 sebesar 0,023 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05 yang menandakan bahwa RKKD berpengaruh positif signifikan terhadap DID. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka H1 dalam penelitian ini terdukung karena dengan peningkatan kemandirian keuangan, pemerintah provinsi tidak bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat melainkan mampu memperoleh dan mengelola PAD untuk berbagai program kegiatannya. Hal tersebut tentu perlu diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan DID.

H2 dalam penelitian ini adalah Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Dana Insentif Daerah. Berdasarkan table koefisien regresi di atas, signifikansi variable X1 bernilai 0,036. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05, yang menandakan bahwa REBD berpengaruh positif signifikan terhadap Dana Insentif Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima. Efisiensi yang baik tentu menjadi salah satu gambaran

bahwa pemerintah provinsi mampu mengelola keuangan dengan baik yang mana akan meningkatkan kinerja keuangan itu sendiri.

Tabel 4. Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5356009278514	2	2678004639257	7.415	0.003 <sup>b</sup>
	146000000.000		073000000.000		
Residual	9751460241131	27	3611651941159		
	723000000.000		89770000.000		
Total	1510746951964	29			
	5869000000.000				

a. Dependent Variable: DID

b. Predictors: (Constant), REBD, RKKD

Dari uji F pada tabel Anova di atas, diketahui bahwa F hitung sebesar 7,415 dengan F tabel sebesar 3,354 dengan probabilitas signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi dan kedua variable yaitu RKKD (X1) dan REBD (X2) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Dana Insentif Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap Dana Insentif Daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil uji dan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variable RKKD berpengaruh positif signifikan terhadap DID. Hal ini dibuktikan dengan Uji T yang menghasilkan signifikansi  $0,023 < 0,05$ . Suatu kemandirian keuangan daerah dianggap baik dalam penerimaan dan pengelolaan PAD untuk membiayai berbagai program daerah untuk kepentingan Masyarakat. Hal tersebut tentu memberikan dampak positif bagi daerah tersebut sendiri karena tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya tingkat kemandirian menjadi sebuah prestasi bagi pemerintah provinsi di Indonesia. Dengan kemandirian yang baik tentu mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula, sehingga pemerintah pusat perlu memberikan apresiasi dalam bentuk DID yang telah ditetapkan.
2. Variabel REBD tidak berpengaruh signifikan terhadap DID dengan hasil signifikansi pada Uji T sebesar  $0,036 < 0,05$ . Rasio efisiensi belanja menggambarkan bahwa pemerintah

provinsi mampu merealisasikan anggaran belanja dengan tepat dan efisien. Sehingga, akan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah provinsi. Dengan efisiensi yang baik maka anggaran yang telah dianggarkan tidak mengalami pemborosan. Hal tersebut tentu akan mendapatkan apresiasi berupa Dana Insentif Daerah oleh pemerintah pusat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohammad (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Nanik, W. 20012. *Analisa Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Skripsi. UIN Maliki. Malang
- Ningsih, A. T. 2010. *Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, F. dan A. Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Jurnal. Universitas Diponegoro 1(1): 1-13
- Nurhazana, Synta. 2021. *Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bengkalis*. Jurnal IAKP: Politeknik Negeri Bengkalis